

ANALISIS PROGRAM PENDAMPINGAN UMKM DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG UNTUK KEMAJUAN UMKM

Abdul Rohman¹, Mustofa Kamil², Erialdy³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: mustofa.kamil@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendorong kemajuan dan kemandirian pelaku usaha. UMKM memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional seperti lokasi UMKM yang tersebar jauh di wilayah kepulauan, tingkat pendidikan pelaku usaha yang mayoritas masih rendah, serta jumlah tenaga pendamping UMKM yang terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pimpinan dinas, kepala bidang, konsultan pendamping, serta pelaku UMKM terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep perencanaan program pendampingan yang dijalankan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Surat Keputusan (SK) dan pembagian jobdesk masing-masing konsultan pendamping, namun proses perencanaan masih bersifat top-down dan belum memiliki format panduan pendampingan baku (modul/buku kerja terstandar); (2) Pelaksanaan pendampingan memberikan kontribusi positif terhadap pengetahuan dasar manajemen, legalitas usaha, pembiayaan, serta motivasi pelaku UMKM, namun belum optimal merata karena pendampingan cenderung terkonsentrasi pada UMKM di sekitar pusat pemerintahan; dan (3) Hambatan utama meliputi keterbatasan jumlah pendamping (7 orang), geografis wilayah, rendahnya literasi digital pelaku usaha berusia di atas 40 tahun, serta keterbatasan anggaran operasional. Perusahaan dan dinas disarankan menyusun buku modul pendampingan praktis terstandar dan mengoptimalkan pendampingan digital berbasis sistem informasi.

Kata kunci: UMKM, Pendampingan, Pemberdayaan, Kinerja Pendamping, Bangka Belitung

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) mentoring program in Bangka Belitung Islands Province in promoting the progress and independence of business actors. MSMEs play a strategic role in regional economic growth, but still face structural and operational constraints such as remote MSME locations across island areas, low education levels among business actors, and a limited number of MSME mentors. This study employed a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation study with agency leaders, division heads, mentor consultants, and MSME actors. The results revealed that: (1) The planning concept of the mentoring program implemented by the Office of Cooperatives and MSMEs of Bangka Belitung Islands Province refers to Decree (SK) and job descriptions for each consultant, but the planning process remains top-

down and lacks standardized written mentoring modules; (2) The implementation of mentoring contributes positively to basic management knowledge, business legality, financing, and entrepreneur motivation, but remains uneven as activities concentrate near office locations; and (3) Major obstacles include a limited mentor count (7 mentors), geographical barriers, low digital literacy among business actors over 40 years old, and limited operational budgets. The agency is advised to develop standardized practical mentoring modules and leverage digital information systems for wider reach.

Keywords: MSMEs, Mentoring, Empowerment, Mentor Performance, Bangka Belitung

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional Indonesia yang terbukti tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi serta berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sektor UMKM memegang peranan sangat vital sebagai penggerak transformasi ekonomi masyarakat pasca-tambang timah menuju sektor ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang berkelanjutan. Meskipun demikian, sebagian besar pelaku UMKM di Bangka Belitung masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, seperti keterbatasan kapasitas manajemen usaha, akses permodalan yang minim, kelemahan dalam inovasi pemasaran dan pengemasan produk, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Koperasi dan UKM telah meluncurkan Program Pendampingan UMKM sebagai wujud intervensi kebijakan publik dalam memberdayakan para pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui penempatan tenaga konsultan pendamping di berbagai bidang keahlian—seperti kelembagaan, produksi, pemasaran, pembiayaan, dan teknologi informasi (IT)—program ini dirancang untuk mendampingi UMKM secara langsung agar mampu naik kelas dan tumbuh mandiri. Namun demikian, berdasarkan evaluasi studi pendahuluan, efektivitas pelaksanaan program pendampingan ini masih menghadapi tantangan serius. Di antaranya adalah persebaran lokasi UMKM yang luas dan berada di pulau-pulau terpencil, mayoritas pelaku usaha berusia di atas 40 tahun dengan tingkat pendidikan formal yang relatif rendah, serta jumlah tenaga konsultan pendamping yang sangat terbatas yakni hanya berjumlah 7 orang untuk mengover seluruh wilayah provinsi.

Kajian literatur dan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai dampak pendampingan terhadap kemajuan UMKM. Penelitian Suhombing (2019) di Kota Tangerang Selatan menemukan bahwa kinerja pendamping UMKM belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan pelaku UMKM karena kendala legalitas dan permodalan. Sebaliknya, studi Akhriza (2022) dan Isabella (2022) menegaskan bahwa pendampingan berbasis branding digital serta penguatan kelembagaan dan produksi mampu meningkatkan kapasitas operasional dan akses pasar UMKM. Dalam konteks Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga teridentifikasi masalah berupa belum tersedianya buku modul atau panduan pendampingan praktis terstandar yang disusun secara khusus oleh dinas, sehingga pola pendampingan sangat bergantung pada inisiatif individu konsultan pendamping.

Berdasarkan fenomena dan perumusan masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama: (1) Bagaimana konsep perencanaan program pendampingan UMKM yang dilaksanakan oleh pendamping ke pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?; (2) Bagaimana hasil dan dampak pendampingan UMKM dalam menentukan kemajuan usaha?; serta (3) Apa saja hambatan dan kendala operasional dalam pelaksanaan program pendampingan UMKM?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas program pendampingan serta merumuskan rekomendasi perbaikan strategis bagi tata kelola pemberdayaan UMKM di daerah kepulauan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman secara mendalam mengenai dinamika, persepsi, serta proses interaksi sosial dalam pelaksanaan program pendampingan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Pelepas No. 06, Air Itam, Kota Pangkalpinang, pada bulan Agustus 2024 hingga Januari 2025.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yang terbagi menjadi informan utama, informan kunci, dan informan tambahan. Informan utama terdiri dari Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ahmad Yani, S.E., M.Si., Ph.D) dan Sekretaris Dinas (Riza Aryani, M.Si). Informan kunci mencakup Kepala Bidang Pengembangan UMKM (Dr. Muslim El Hakim K) dan Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM (Yuniar Putia Rahma, S.STP., M.Si). Sedangkan informan tambahan terdiri dari 5 orang konsultan pendamping UMKM yaitu Soib (Bidang Kelembagaan), Maryani (Bidang Produksi), Aima Idayulaela (Bidang Pembiayaan), Rara (Bidang Kerjasama), dan Rifky (Bidang IT).

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan / Unit Kerja	Kategori Informan
1	Ahmad Yani, S.E., M.Si., Ph.D	Plt. Kepala Dinas Koperasi & UKM	Informan Utama
2	Riza Aryani, M.Si	Sekretaris Dinas Koperasi & UKM	Informan Utama
3	Dr. Muslim El Hakim K	Kepala Bidang Pengembangan UMKM	Informan Kunci 1
4	Yuniar Putia Rahma, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM	Informan Kunci 2
5	Soib	Konsultan Pendamping Bidang	Informan

		Kelembagaan	Tambahan 1
6	Maryani	Konsultan Pendamping Bidang Produksi	Informan Tambahan 2
7	Aima Idayulaela	Konsultan Pendamping Bidang Pembiayaan	Informan Tambahan 3
8	Rara	Konsultan Pendamping Bidang Kerjasama	Informan Tambahan 4
9	Rifky	Konsultan Pendamping Bidang IT	Informan Tambahan 5

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) Wawancara mendalam (in-depth interview) berbasis pedoman wawancara terstruktur dan semi-terstruktur; (2) Observasi lapangan terhadap interaksi pendampingan di kantor dinas dan lokasi UMKM; serta (3) Studi dokumentasi atas Surat Keputusan (SK), laporan bulanan konsultan pendamping, profil UMKM, dan regulasi dinas. Teknis analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup tiga tahapan simultan: kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display) dalam bentuk teks naratif dan tabel matriks, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Pengujian keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Perencanaan Program Pendampingan UMKM

Hasil wawancara dan analisis dokumentasi menunjukkan bahwa konsep perencanaan program pendampingan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas yang memuat uraian tugas (jobdesk) masing-masing konsultan pendamping. Menurut Plt. Kepala Dinas (Ahmad Yani), penyusunan program pendampingan mengacu pada regulasi dan SK jabatan guna memastikan setiap pendamping memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan spesialisasi kualifikasinya.

Meskipun SK jabatan telah menetapkan pembagian tugas umum, penelitian menemukan kendala mendasar dalam aspek standarisasi perencanaan. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki modul tertulis, buku kerja terstandar, atau standar operasional prosedur (SOP) pedoman pendampingan praktis yang dibukukan secara khusus. Akibatnya, perencanaan kegiatan pendampingan harian dan mingguan sangat bergantung pada inisiatif masing-masing konsultan pendamping. Sebagaimana diungkapkan oleh Kabid Pemberdayaan UMKM (Yuniar Putia Rahma),

dinas masih mengandalkan mekanisme pelaporan rutin, jam kerja, dan pengawasan hasil laporan tanpa ketersediaan format modul operasional terpadu. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Wamundila (2020) bahwa tanpa adanya sistem pendampingan yang terdokumentasi secara eksplisit dan baku, evaluasi kinerja cenderung bersifat subjektif serta menurunkan tingkat akuntabilitas tata kelola program.

Selain itu, proses perencanaan program pendampingan masih cenderung berlangsung secara top-down di mana pimpinan dinas menjadi perancang utama arah kebijakan, sementara masukan dari konsultan pendamping di lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dalam penyusunan anggaran operasional tahunan. Pola ini menyebabkan program pendampingan bersifat responsif-pasif (menunggu pelaku UMKM yang datang membutuhkan bantuan), daripada bersifat proaktif-preskriptif yang terencana secara sistematis berdasarkan pemetaan kebutuhan UMKM di tiap kabupaten/kota.

2. Hasil Pendampingan dan Kemajuan UMKM

Pelaksanaan pendampingan oleh 7 konsultan pendamping di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbukti memberikan dampak dan kontribusi positif terhadap perkembangan pelaku UMKM binaan. Indikator kemajuan UMKM dinilai berdasarkan perubahan kapasitas usaha yang tercermin dalam laporan bulanan konsultan pendamping dan verifikasi lapangan. Dampak pendampingan terbagi ke dalam lima ranah spesialisasi operasional:

- a. Bidang Kelembagaan: Konsultan pendamping (Soib) berhasil memfasilitasi legalitas usaha pelaku UMKM, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Halal, dan Izin PIRT. Legalitas ini menjadi fondasi utama bagi UMKM untuk mengakses pasar formal dan program bantuan pemerintah.
- b. Bidang Produksi dan Kemasan: Konsultan pendamping (Maryani) memberikan bimbingan teknis perbaikan standar mutu produksi, higienitas sanitasi, serta modernisasi desain kemasan (packaging) dan pelabelan produk makanan khas daerah agar memiliki daya saing tinggi.
- c. Bidang Pembiayaan: Konsultan pendamping (Aima Idayulaela) mendampingi UMKM dalam penyusunan pencatatan keuangan sederhana, serta menjembatani akses literasi keuangan menuju program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan modal usaha.
- d. Bidang Pemasaran dan Kerjasama: Konsultan pendamping (Rara) membantu perluasan jaringan kemitraan UMKM melalui fasilitasi keikutsertaan pameran UMKM lokal/nasional serta kemitraan dengan jaringan minimarket dan pusat oleh-oleh daerah.
- e. Bidang Teknologi Informasi (IT): Konsultan pendamping (Rifky) memberikan pelatihan literasi digital dasar, digital branding, pembuatan toko online di e-commerce, serta pemanfaatan media sosial untuk promosi bisnis.

Kabid Pengembangan UMKM (Dr. Muslim El Hakim K) menegaskan bahwa kriteria utama UMKM dikategorikan 'maju' adalah terjadinya tumbuh-kembang usaha, peningkatan omzet penjualan, serta perluasan jangkauan pasar yang terdokumentasi

secara konsisten dalam laporan evaluasi bulanan. Namun demikian, penelitian mencatat bahwa pencapaian kemajuan UMKM ini belum merata di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan pendampingan intensif masih didominasi oleh pelaku UMKM yang berada di sekitar Pusat Perkantoran Provinsi (Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah), sedangkan UMKM di pulau terluar (seperti Pulau Belitung, Pulau Lepar, dan wilayah pelosok) belum terjangkau secara optimal.

3. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Program Pendampingan

Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan seluruh informan, teridentifikasi empat hambatan utama yang menjadi faktor penghambat efektivitas program pendampingan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Keterbatasan Jumlah Tenaga Konsultan Pendamping: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini hanya memiliki 7 orang konsultan pendamping. Jumlah ini sangat disproportional dibandingkan dengan populasi puluhan ribu pelaku UMKM yang tersebar di 6 kabupaten dan 1 kota. Rasio pendampingan yang sangat tinggi ini mengakibatkan beban kerja pendamping sangat berat dan menurunkan intensitas pertemuan tatap muka.
2. Geografis dan Aksesibilitas Wilayah Kepulauan: Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari banyak pulau memisahkan lokasi UMKM dari pusat dinas. Jarak tempuh yang jauh dan biaya transportasi laut yang tinggi menjadi kendala logistik utama bagi pendamping untuk melakukan observasi dan verifikasi lapangan secara berkala.
3. Karakteristik Demografi dan Rendahnya Literasi Digital Pelaku Usaha: Mayoritas pelaku UMKM binaan berusia di atas 40 tahun dengan tingkat pendidikan formal yang relatif rendah. Kondisi ini menciptakan resistensi terhadap adopsi teknologi baru, keterbatasan kemampuan menyerap materi manajemen modern, serta perlunya kesabaran ekstra dalam proses pendampingan teknis.
4. Keterbatasan Anggaran Operasional dan Sarana Prasarana: Alokasi anggaran dinas untuk biaya perjalanan dinas dan insentif lapangan konsultan pendamping masih terbatas. Selain itu, sarana pendukung pendampingan berbasis sistem informasi belum terintegrasi secara penuh.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif dan pembahasan mengenai Program Pendampingan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perencanaan program pendampingan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengacu pada Surat Keputusan (SK) dan pembagian tugas profesional konsultan pendamping. Namun, proses perencanaan

masih bersifat top-down serta menghadapi kelemahan dalam hal standarisasi karena belum tersedianya modul operasional atau buku panduan pendampingan praktis terstandar.

2. Program pendampingan memberikan kontribusi positif yang nyata terhadap kemajuan UMKM, khususnya dalam peningkatan pemahaman legalitas usaha (NIB/Halal), mutu kemasan produk, pengelolaan keuangan dasar, serta adopsi pemasaran digital. Namun, tingkat kemajuan usaha belum merata secara geografis karena pendampingan masih terpusat di sekitar wilayah Pangkalpinang dan Bangka Tengah.
3. Pelaksanaan program pendampingan menghadapi hambatan struktural utama berupa sangat terbatasnya jumlah konsultan pendamping (7 orang), aksesibilitas geografis wilayah kepulauan, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi digital pelaku UMKM senior (usia > 40 tahun), serta keterbatasan alokasi anggaran operasional lapangan.

Referensi

Buku

- Ambar, T. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pembangunan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policy Making (5th ed.)*. USA: Houghton Mifflin Company.
- Cipta Pratama dkk. (2021). *Dasar Ilmu Manajemen*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Darmadi. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kepemimpinan Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanim, L., & Noorman, M. S. (2020). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: UNISSULA Press.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marwansyah. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Notoatmodjo, S. (2016). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior (18th ed.)*. New York: Pearson Education.
- Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Menghadapi Abad Ke-21*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Jurnal

- Akhriza, T. M. (2022). Evaluasi pendampingan branding berbasis platform digital bagi UMKM se-Malang Raya. *Jurnal STIKI Informatika*, 12(2), 45–56.
- Amiruddin. (2016). Pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 12–24.
- Isabella, A. A. (2022). Efektivitas pendampingan konsultan pendamping UMKM terhadap kinerja UMKM. *Jurnal Manajemen*, 16(2), 88–98.
- Ningtyas, A. K. (2024). Peranan pendampingan UMKM untuk meningkatkan usaha dan akses pasar pedagang SWK Urip Sumoharjo. *Jurnal Ekonomi dan UMKM*, 2(4), 101–112.
- Suhombing, N. L. N. (2019). Analisis kinerja pendamping usaha mikro kecil menengah Kota Tangerang Selatan terhadap kemajuan UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen UPB*, 7(2), 115–126.
- Wamundila, S. (2020). Standardized mentoring systems and organizational accountability in public sector development. *International Journal of Public Administration*, 43(4), 312–325.